



DEWAAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**CATATAN RAPAT KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
PEMBANGUNAN PERDESAAN, KAWASAN TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI; BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA; BADAN NASIONAL Pencarian dan
PERTOLONGAN; SERTA BADAN PEMBANGUNAN WILAYAH SURAMADU)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 17 Maret 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.05 - 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan Komisi V DPR-RI Gedung Nusantara II Lantai 2 DPR RI
Acara	: Aspirasi dari Komisi III DPRD Prov. Maluku mengenai Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Ketua Rapat	: H. Muhamad Arwani Thomafi (Pimpinan Komisi V DPR-RI/FPPP)
Mitra Kerja	: Komisi III DPRD Prov. Maluku

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.05 WIB, dan Rapat dipimpin oleh H. Muhamad Arwani Thomafi (Pimpinan Komisi V DPR-RI/FPPP).
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat hari ini mengenai aspirasi Komisi III DPRD Prov. Maluku terkait Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Ketua Rombongan untuk menyampaikan aspirasi dan paparannya.

II. RINGKASAN ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN:

- Provinsi Maluku sangat membutuhkan perhatian dan dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi di tengah pandemic Covid-19 termasuk diantaranya pembangunan jalan, jembatan, drainase dan irigasi serta perumahan.
- Sehubungan dengan luas wilayah provinsi Maluku sangat luas, namun APBD yang tersedia sangat kecil, hal ini mengakibatkan terjadi ketimpangan pembangunan di seluruh kabupaten kota di Maluku.

- Bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh.
- Di Kota Ambon misalnya, masih terdapat lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera di tangani.
- Ada beberapa program Padat Karya yang di rasakan sangat membantu masyarakat diantaranya program KOTAKU. Untuk tahun 2021, program ini berada di Kota Ambon dan Kota Tual. Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pelaksanaan sehingga dampaknya segera di rasakan oleh masyarakat.
- Terkait dengan semakin meluasnya lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di beberapa Kota/Kabupaten di Maluku, kami meminta intervensi pemerintah pusat terhadap program KOTAKU di tahun 2022 dan lebih di tingkatkan di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah (Usulan dan Keputusan Walikota terlampir).
- Terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di provinsi Maluku, kami meminta intervensi Pemerintah pusat lewat APBN untuk program Jalan Non Status, Jalan Desa, Jembatan penyeberangan, Air Bersih, Sanitasi, Persampahan, Pansimas, Sanimas, Pisew, P3TGAI, Tambatan Perahu, Pelabuhan-pelabuhan rakyat, desa wisata, BumDesa, PJJ, Bis Sekolah, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi.
- Untuk memastikan program KOTAKU sangat di butuhkan masyarakat di Kota Ambon dan Kota Tual, Kami meminta Komisi V untuk meninjau secara langsung.

III. TANGGAPAN KOMISI V DPR RI:

- Komisi V akan memperjuangkan usulan DPRD Provinsi Maluku di bidang infrastruktur Jalan Nasional, Strategis Nasional, Jalan Provinsi, jalan kabupaten, Jalan desa, pembangunan jembatan dan draenase, pembangunan irigasi dan program padat karya, Infrastruktur desa serta khususnya Program KOTAKU di tahun 2022 demi kesejahteraan masyarakat dengan Kementerian teknis terkait.
- Komisi V meminta DPRD Provinsi Maluku terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder di daerah untuk mempermudah aksesibilitas dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan bersama DPRD Provinsi Maluku, Komisi V akan Melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Maluku untuk meninjau secara langsung kondisi Program KOTAKU dan program-program Padat Karya Lainnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan audiensi dengan pimpinan DPRD Provinsi Maluku. Sesuai dengan prosedur, seluruh isi audiensi ini telah direkam dan akan dilaporkan serta disampaikan pada rapat Komisi dengan mitra terkait untuk ditindaklanjuti.

LAMPIRAN:

Peserta audensi ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku:

NO	NAMA	JABATAN
1	Richard Rahakbauw, SH	Ketua Komisi III DPRD
2	M. Hatta Hehanussa, SE	Wakil Ketua Komisi III DPRD
3	Rovik Akbar Afifudi, SE	Anggota
4	Yohanes Batkunde	Pendamping
5	Rosye Lewerissa	Pendamping
6	Valentino	Pendamping